

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU Nomor 8 Tahun 1985, lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 44.
- _____. Undang-Undang tentang Kementerian Negara, UU Nomor 39 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166.
- _____. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU Nomor 17 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.
- _____. Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara, PerPres Nomor 7 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012
- _____. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016.

_____. Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara,
PerPres Nomor 32 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 106.

_____. Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara,
PerPres Nomor 68 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 203.

B. Buku

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni. 1991.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada,
2006.

Ismiyarto. *Budaya Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Pada Organisasi
Publik (Teori, Kebijakan, Dan Aplikasi)*. Bandung : alfabeta bandung,
2016.

Mulano, Martias Gelar Imam Radjo. *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-
Istilah Hukum Belanda – Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia, 2012.
- Murjiyanto, R. *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan (Yayasan dan Perkumpulan)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2017.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hokum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2015
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang. Jakarta : Sinar Harapan, 1983.
- Utami, Rizki. *kedudukan dan pertanggungjawaban organisasi kemasyarakatan (ormas) berbentuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum (studi pada perkumpulan generasi manahan berkedudukan di kota medan)*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara Medan. 2020.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Winayanti, Nila Karnia. *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.

C. Lain-lain

Kemenkumham. “sejarah kementerian hukum dan hak asasi manusia”.

<https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1402/sejarah-kemenkumham.pdf>, diakses tanggal 26 Maret 2021.

Tirto.id, “cara dan syarat mendirikan ormas yang berbadan hukum”.

<https://tirto.id/cara-dan-syarat-mendirikan-ormas-yang-berbadan-hukum-eQeP>., diakses tanggal 28 Maret 2021.

Hukum online, “metamorphosis badan hukum Indonesia”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-badan-hukum-indonesia-ho117818>, diakses tanggal 30 Maret 2021.

Suryani dias, *Ciri-ciri Paguyuban (gemeinschaft) dan patembayan*

(Gesellschaft) <https://www.sridianti.com/sosiologi/ciri-ciri-paguyuban.html> di akses pada tanggal 25 januari 2022

Latifa Mustafida, “*Perkumpulan berbadan hukum vs perkumpulan tidak*

berbadan hukum” <https://legal2us.com/perkumpulan-berbadan-hukum-vs-perkumpulan-tidak-berbadan-hukum/> diakses pada tanggal 25 januari 2022

Catur Prabowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi*

Kemasyarakatan Oleh Pemerintah, diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, (Vol 7 No.1 Tahun 2015)

Bpkp, Kitab undang undang Hukum Perdata

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Viewer.js/Peraturan/Hukum/KUHP-Perdata-Bagian-1.pdf> diakses pada tanggal 25 Januari 2022

Hukum online, "*prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan*"

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan-cl6163> di akses pada tanggal 25 januari 2022